

**KOORDINASI TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

(SKRIPSI)

Oleh:

VERONIKA FRISDA ANINTYA

NPM. 1916041005



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK

KOORDINASI TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

VERONIKA FRISDA ANINTYA

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Pringsewu adalah *stunting*. Kabupaten Pringsewu ditetapkan sebagai salah satu lokus penurunan *stunting* dalam Keputusan Menteri Pembangunan Nasional Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021. Masalah yang ditemukan dalam upaya penurunan *stunting* yaitu kurang optimalnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah yang mempunyai peran dalam penurunan *stunting*. Hal ini membuat pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu harus mengatasi permasalahan diatas. Upaya yang dilakukan yaitu mengeluarkan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 438 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* (TPPS) di Kabupaten Pringsewu. Obyek penelitian ini dilakukan pada 8 perangkat daerah Kabupaten Pringsewu, 2 Kecamatan, dan 2 Pekon Lokus penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yaitu analisis data model interaktif. Hasil penelitian dianalisis menggunakan indikator-indikator koordinasi menurut Handayningrat (1991) yaitu peran pimpinan dalam koordinasi dan kesatuan tindakan, kerjasama dan proses terus menerus, pengaturan usaha kelompok dan mencapai tujuan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPPS Kabupaten Pringsewu telah berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas penurunan *stunting* sehingga angka *stunting* di Kabupaten Pringsewu berhasil turun.

Kata Kunci: Koordinasi, *Stunting*, TPPS Kabupaten Pringsewu

ABSTRACT

COORDINATION OF STUNTING REDUCTION ACCELERATION TEAM IN PRINGSEWU DISTRICT

By

VERONIKA FRISDA ANINTYA

One of the problems faced by Pringsewu Regency is stunting. Pringsewu Regency is designated as one of the stunting reduction loci in the Decree of the Minister of National Development Number 42 of 2020 concerning the Determination of Regency / City Expansion of Integrated Stunting Reduction Intervention Focus Locations in 2021. The problem found in efforts to reduce stunting is the lack of optimal coordination between regional apparatus organizations that have a role in reducing stunting. This makes the Pringsewu Regency local government have to overcome the above problems. The effort made was to issue Pringsewu Regent Decree Number 438 of 2022 concerning the Pringsewu Regency Stunting Reduction Acceleration Team. This study aims to analyze the coordination of the stunting reduction acceleration team (TPPS) in Pringsewu Regency. The object of this research was conducted in 8 regional apparatus of Pringsewu Regency, 2 sub-districts, and 2 villages with stunting reduction locus in Pringsewu Regency. Researchers used a type of qualitative research with data collection techniques through: observation, interviews, and documentation. Researchers used data analysis techniques according to Miles, Huberman, and Saldana (2014), namely interactive model data analysis. The results of the study were analyzed using indicators of coordination according to Handayningrat (1991), namely the role of leaders in coordination and unity of action, cooperation and continuous processes, regulation of group efforts and achieving common goals. The results showed that the Pringsewu Regency TPPS had coordinated well in carrying out stunting reduction tasks so that the stunting rate in Pringsewu Regency had decreased.

Keywords: Coordination, Stunting, TPPS Pringsewu Regency

**KOORDINASI TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh

VERONIKA FRISDA ANINTYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **KOORDINASI TIM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN
PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : **Veronika Frisda Anintya**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1916041005

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

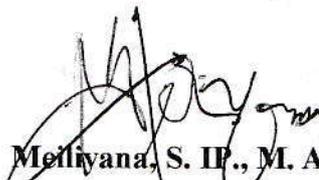


Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M. Si
NIP. 19710122 199512 2 001



Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. AP
NIP. 19830815 201012 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Meliyana, S. IP., M. A
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M. Si**

Sekretaris : **Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. AP**

Penguji : **Simon Sumanjoyo H. S.A.N., M. PA**



2^o Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M. Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian : **23 Oktober 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2023
Yang Menyatakan,



Veronika Frisda Anintya
NPM. 1916041005

RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan nama lengkap Veronika Frisda Anintya, lahir pada tanggal 19 Januari 2001 di Waringinsari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Robertus Ekowahyudi dan Ibu Maria Agustiati.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Waringinsari Barat dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius Pringsewu yang selesai pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAS Xaverius Pringsewu jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kemudian lulus pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2019.

Penulis aktif dalam mengikuti Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) dan menjadi Sekretaris Bidang Dana dan Usaha HIMAGARA pada periode tahun 2022. Penulis juga aktif mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM-U) Katolik UNILA sebagai anggota Tim Kerja Divisi Hubungan Masyarakat pada periode tahun 2021. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2022 di Pekon Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Penulis kemudian mengikuti Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB) FISIP 2022 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pringsewu periode Maret – Agustus 2022.

MOTTO

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai Sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

(Yeremia 29 : 11)

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur

(Filipi 4 : 6)

Teruslah berjalan, sampai apa yang kamu perjuangkan, berhasil kamu dapatkan. Apapun hasilnya nanti, jangan lupa selalu bersyukur dan mengapresiasi diri. Sebab apapun yang terjadi, kamu selalu berusaha menjadi yang terbaik.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia dan berkahnya kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Bapak dan Ibu Tersayang

Bapak Robertus Ekowahyudi dan Ibu Maria Agustiati

Adik Melania Kezya Natalita

Terimakasih atas segala doa, semangat, dukungan, kasih sayang, perjuangan, dan kesabaran yang telah diberikan untuk keberhasilanku. Terimakasih telah memotivasiku agar terus berjuang untuk mencapai gelar ini. Kupersembahkan kelulusan ini untuk bapak, ibu, dan adik sesuai janjiku. Semoga bapak, ibu, dan adik selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan agar selalu bisa menemaniku menuju kesuksesan.

Sahabat-Sahabatku

Terimakasih atas dukungan, bantuan, saran, dan doa yang diberikan. Terimakasih sudah menemani proses perkuliahan sampai pada penyelesaian tulisan ini. Semoga diberikan kelancaran dalam mencapai cita-cita kalian.

Para Dosen dan Civitas Akademika

Terimakasih telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta dukungan dan doa. Semoga ilmu yang diberikan bisa menjadi bekal dalam menempuh dunia kerja. Semoga selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam segala urusannya.

Almamaterku Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SAN WACANA

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KOORDINASI TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN PRINGSEWU”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik seperti saat ini tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua, Bapak Robertus Eko Wahyudi dan Maria Agustiati. Terimakasih atas kerja keras, perjuangan, doa, motivasi, dan nasehat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M. Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Meiliyana, S. IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Ibu Ita Prihantika, S. Sos., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
5. Ibu Rahayu Sulistiowati, S. Sos., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam pengerjaan skripsi. Terimakasih atas bimbingan, ilmu, waktu, motivasi, dan nasehat yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga ibu diberikan kesehatan, rezeki, kebahagiaan, dan dimudahkan dalam menyelesaikan segala urusan.

6. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. AP selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis dalam pengerjaan skripsi. Terimakasih atas bimbingan, ilmu, waktu, motivasi, dan nasehat yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga ibu diberikan kesehatan, rezeki, kebahagiaan, dan dimudahkan dalam menyelesaikan segala urusan.
7. Bapak Simon Sumanjyo. H, S. A.N., M. PA. selaku dosen penguji skripsi penulis. Terimakasih untuk semua saran yang diberikan untuk perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga bapak diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusannya.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Mba Wulan dan Mba Uki selaku Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih telah membantu dan memberikan pelayanan administrasi kepada penulis dengan baik dan penuh kesabaran selama perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi.
10. Keluarga besar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pringsewu khususnya Ibu Cicih, Ibu Fitri, Bapak Andi, Bapak Faisal, Ibu Elyani, Bapak Christianto, Ibu Yuliana, Ibu Keke, dan Mba Beti. Terimakasih banyak atas izin, ilmu, bantuan, motivasi, dan arahan dalam proses PMMB 2022 sampai pada penyelesaian skripsi ini.
11. Informan-Informan dalam peneltian skripsi ini yaitu Bapak Christianto, Ibu Nova, Ibu Ria, Ibu Aminah, Bapak Yuli, Bapak Firdaus, Bapak Sumarno, Bapak Dedy, Ibu Saptikawati, Ibu Avita, Ibu Diana, dan Mba Amel. Terimakasi atas keterbukaan informasi dan data yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Adik tercinta Melania Kezya Natalita. Terimakasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan. Terimakasih sudah menjadi penghibur dan pendengar bagi penulis selama proses pengerjaan skripsi. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran dalam mencapai cita-cita, dan dipermudah segala urusan untuk hari depan.
13. Kepada Redi Agam, S. Hut. Terimakasih atas bantuan, dukungan, doa, dan saran yang membangun untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Sahabat penulis khususnya Septiya, Siti Darina, Junia Simbolon, Katarina Esti Wulandari, dan Widyawati Bagus Pratama terimakasih atas bantuan, saran, dan waktunya dalam menemani penulis selama turun lapang dan dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih telah menjadi teman penulis dari mahasiswa baru sampai dengan kelulusan ini. Semoga kalian dimudahkan dalam menggapai cita-cita.
15. Teman-teman GRANADA 2019. Terimakasih atas semangat yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada diriku sendiri. Terimakasih Vero sudah mampu bertahan sejauh ini. Terimakasih untuk tidak menyerah ditengah hambatan yang dialami selama proses perkuliahan. Semoga skripsi ini menjadi bagian yang bermakna dari proses pendewasaan diri.

Akhir kata penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran agar karya tulis selanjutnya dapat lebih baik lagi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2023

Penulis

Veronika Frisda Anintya

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Koordinasi.....	10
2.2.1 Ciri-Ciri Koordinasi.....	12
2.2.2 Prinsip dan Unsur Koordinasi	14
2.2.3 Tujuan dan Manfaat Koordinasi.....	16
2.2.4 Jenis Koordinasi	18
2.2.5 Indikator-Indikator Koordinasi.....	19
2.2.6 Masalah Koordinasi	20
2.3 Koordinasi Dalam Organisasi	21
2.3.1 Faktor Pendukung Keberhasilan Koordinasi Melalui Tim Kerja	23
2.4 <i>Stunting</i>	23
2.4.1 Penyebab <i>Stunting</i>	25
2.4.2 Dampak <i>Stunting</i>	26
2.5 Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32

3.6 Teknik Analisis Data	36
3.7 Teknik Keabsahan Data	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Pringsewu	40
4.1.1 Sejarah Kabupaten Pringsewu.....	40
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Pringsewu.....	41
4.1.3 Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu.....	42
4.2 Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pringsewu	43
4.3 Hasil Penelitian	50
4.3.1 Peran Pimpinan dalam Koordinasi dan Kesatuan Tindakan	51
4.3.2 Kerjasama dan Proses Terus Menerus	61
4.3.3 Pengaturan Usaha Kelompok dan Mencapai Tujuan Bersama	67
4.4 Pembahasan Penelitian	77
4.4.1 Peran Pimpinan dalam Koordinasi dan Kesatuan Tindakan	78
4.4.2 Kerjasama dan Proses Terus Menerus	82
4.4.3 Pengaturan Usaha Kelompok dan Mencapai Tujuan Bersama	88
V. PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. <i>Prevalensi Stunting</i> Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2021.....	2
2. Kajian Penelitian Terdahulu	7
3. Daftar Informan Penelitian	33
4. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian.....	35
5. Aktor-Aktor yang terlibat dalam koordinasi TPPS di Kabupaten Pringsewu	74
6. Matriks Koordinasi Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Pringsewu.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	28
2. Ruang Sekretariat TPPS Kabupaten Pringsewu	49
3. Rapat Koordinasi TPPS dan Sosialisasi SK TPPS 2022.....	51
4. Rembuk <i>Stunting</i> Tingkat Kabupaten Pringsewu tahun 2023	55
5. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi di Kecamatan Sukoharjo	56
6. Rembuk <i>Stunting</i> Tingkat Pekon Sukoharjo II Tahun 2023	57
7. Kegiatan Penguatan KPM di Kecamatan Pagelaran.....	61
8. Pekon Pamenang menghadiri undangan dari RAPEMDA.....	63
9. Pembagian PMT di Pekon Sukoharjo II.....	65
10. FGD <i>Stunting</i> di Pekon Sukoharjo II	70
11. Penyuluhan <i>Stunting</i> di Pekon Pamenang	71
12. Kegiatan Kelas Ibu BALITA di Pekon Pamenang.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonom mempunyai hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Salah satu wewenangnya adalah mengatur kepentingan publik setempat melalui pembangunan daerah.

Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pringsewu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu adalah terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas (Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2020). SDM yang berkualitas memiliki fisik yang tangguh, pikiran yang cerdas, mental yang kuat, dan kesehatan yang prima. Hal tersebut sangat ditentukan oleh status gizi setiap individu dalam masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan penduduknya untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menanggulangi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan gizi. Salah satu

permasalahan gizi yang dialami oleh Kabupaten Pringsewu adalah *stunting* (Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2020). *Stunting* adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya yang seusia (Rahayu et al., 2018). Adanya *stunting* menunjukkan status gizi yang kurang (*malnutrisi*) dalam jangka waktu yang lama (*kronis*) (Candra MKes(Epid), 2020).

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu penyumbang *prevalensi stunting* yang cukup tinggi (Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2020). *Prevalensi* merupakan jumlah orang yang mengalami penyakit dalam waktu dan tempat tertentu (Eni & Asridiana, 2020). Berdasarkan data dari riset kesehatan dasar (Riskedas) Kementerian Kesehatan yang digunakan oleh Bappeda Kabupaten Pringsewu, *prevalensi stunting* di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2018 sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. *Prevalensi Stunting* Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2021

Tahun	<i>Prevalensi Stunting</i> di Kabupaten Pringsewu
2018	20,19%
2019	17,76%
2020	7,57%
2021	6,54%

Sumber: Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa angka *stunting* di Kabupaten Pringsewu telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Fakta menunjukkan pada tahun 2020 Kabupaten Pringsewu masih memiliki kasus sebanyak 7,57% atau setara dengan 2.145 BALITA penderita *stunting*. Pada tahun 2021 masih tercatat sebanyak 6,54% atau setara dengan 1.843 BALITA *stunting* di Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu akhirnya masuk kedalam salah satu daerah kabupaten atau kota yang menjadi lokus pemerintah pusat untuk

menekan angka *stunting* di daerahnya. Pernyataan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pembangunan Nasional No. 42 Tahun 2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021.

Berdasarkan laporan pelaksanaan penurunan *stunting* Kabupaten Pringsewu Tahun 2020, ditemukan masalah dalam upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu yaitu kurang optimalnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai peran dalam upaya penurunan *stunting* (Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2020). OPD yang terlibat kurang mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi sehingga berdampak pada tidak optimalnya penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu (Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2020).

Permasalahan serupa juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami kasus *stunting*. Penelitian di Kota Padang menunjukkan adanya masalah implementasi penurunan *stunting*. Masalahnya adalah belum optimalnya koordinasi pemangku kepentingan pada intervensi gizi spesifik dan sensitif, koordinasi antar OPD belum didukung oleh regulasi khusus daerah, kurangnya sosialisasi tentang gizi, dan kurangnya kesadaran masyarakat (Febrian & Yusran, 2021).

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kuningan juga menunjukkan adanya hambatan dalam menangani *stunting*. Permasalahan dalam penanganan *stunting* disebabkan oleh kurang optimalnya koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan. Akibat dari masalah tersebut adalah terhambatnya penurunan *stunting* secara efektif dan efisien (Waliyudin et al., 2022).

Penelitian di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah juga menunjukkan permasalahan serupa dalam penurunanan *stunting*. Tingginya angka *stunting* terjadi karena lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Hal tersebut menjadi tantangan pemerintah daerah untuk saling berkolaborasi dan berkoordinasi dalam *konvergensi* percepatan penurunan *stunting* (Wicaksana, 2016).

Stunting menyebabkan turunnya kualitas SDM pada generasi yang akan datang. Permasalahan *stunting* perlu untuk segera diatasi. Pemerintah telah berupaya untuk menangani *stunting* dengan penerbitan berbagai regulasi. Salah satunya yaitu Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) Periode 2018-2024. Strategi tersebut menegaskan bahwa kabupaten/kota memiliki peran penting dalam upaya penurunan *stunting*. Pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas untuk melakukan koordinasi terkait dengan anggaran, SDM, dukungan logistik, dan kemitraan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung upaya penurunan *stunting* (Kementrian PPN, 2018). Kabupaten/kota harus membentuk forum koordinasi dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (Kementrian PPN, 2018).

Perintah pembentukan tim percepatan penurunan *stunting* dipertegas kembali melalui Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dalam aturan tersebut diamanahkan bahwa tim harus dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.

Guna menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu menerbitkan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 495 Tahun 2020 tentang Tim Percepatan Intervensi Penurunan *Stunting* Kabupaten Pringsewu dan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 438 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pringsewu bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar perangkat daerah. Tim ini juga ditugaskan untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu.

Setelah melihat permasalahan diatas serta perintah pembentukan tim percepatan penurunan *stunting* maka salah satu dimensi yang perlu ditinjau adalah mengenai koordinasi. Koordinasi merupakan suatu kegiatan untuk mencapai sasaran dan kegiatan dari unit kerja yang terpisah dalam tujuan organisasi yang efektif (Febrian & Yusran, 2021). Koordinasi adalah upaya untuk menggerakkan tim dengan memberikan tugas dan pekerjaan yang relevan kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan tersebut dijalankan dengan selaras dan semestinya (Sugihartatmo & Sentika, 2017).

Berdasarkan uraian fakta dan masalah diatas, sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* dalam upaya menurunkan kasus *stunting* di Kabupaten Pringsewu. Peneliti kemudian tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan lebih lanjut. Peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“KOORDINASI TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN PRINGSEWU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pringsewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pringsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dari penelitian yang telah dilaksanakan dengan cara merealisasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan kedalam pembahasan Koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi saran di periode selanjutnya bagi tim percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Pringsewu untuk memperbaiki koordinasi antar OPD anggota tim agar dapat menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Pringsewu dengan lancar.

2. Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi bagi pembaca mengenai Koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pringsewu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti memilih tema terkait dengan analisis koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu untuk diteliti. Pada bagian ini peneliti menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang dapat menjadi pedoman dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu menjadi bahan perbandingan dengan penelitian ini untuk mempermudah mengidentifikasi masalah atau kajian teori yang akan digunakan oleh peneliti.

Tabel 2. Kajian Penelitian Terdahulu

Judul	Hasil	Perbedaan Penelitian
Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Koordinasi Konvergensi Pencegahan <i>Stunting</i> Di Kabupaten Gunung Mas	Penelitian disamping menggunakan metode penelitian kualitatif. Masalah yang ditemukan adalah masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar organisasi perangkat daerah sehingga angka <i>stunting</i> di Kabupaten Gunung Mas masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan pemerintah daerah untuk	Perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian yaitu ingin menganalisis peran Bappeda Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencegahan

Provinsi Kalimantan Tengah (Wicaksana, 2016)	berkoordinasi dan berkolaborasi. Sesuai dengan amanat Perpres No 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan <i>stunting</i> , Bappeda merupakan sektor pemimpin yang harus mampu mengoordinir semua komponen. Peneliti menggunakan teori Soekanto Soerjono (2012) yang menilai peran dari dimensi hak dan kewajiban. Hasil penelitian menunjukkan Peran Bappeda dalam hal ini sudah baik namun belum optimal ditinjau dari koordinasinya.	<i>stunting</i> sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi tim percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Pringsewu.
Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan <i>Stunting</i> di Kabupaten Malang (Maulana et al., 2022)	Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Masalah dalam penelitian ini yaitu Impelmentasi Kebijakan mengacu pada Peraturan Bupati Malang No.30 Tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan <i>Stunting</i> . Teori yang digunakan adalah “A Model of The Policy Implementation Process” oleh Donald Van Meter & Carl Van Horn (1975). Analisis implementasi model ini mencakup 6 varibael yaitu: standar dan tujuan, sumberdaya kebijakan, komunikasi agen pelaksana, karakteristik badan pelaksana, disposisi para pelaksana, kondisi ekonomi sosial politik. Setelah dianalisis ditemukan adanya <i>refocusing</i> anggaran kesehatan yang menyebabkan beberapa implementasi kebijkan intervensi gizi spesifik di Kabupaten Malang tidak terlaksana. Upaya yang dilakukan adalah kunjungan rumah oleh petugas gizi puskesmas dan bidan desa untuk menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas.	Perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan teori implementasi menurut Donald Van Meter & Carl Van Horn (1975) yang menempatkan 6 variabel yang menghubungkan kebijakan dan kinerja dalam implementasi kebijakan publik sedangkan penelitian ini menggunakan ciri-ciri koordinasi menurut Handayaniingrat (1991) yang mencakup : 1. Peran pimpinan dan kesatuan tindakan 2. Kerjasama dan proses terus menerus 3. Pengaturan usaha kelompok dan mencapai tujuan bersama

Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan <i>Stunting</i> Di Kota Padang (Febrian & Yusran, 2021)	Penelitian Febby Febrian dan Rahmadani Yusran menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Masalah dalam penelitian tersebut adalah belum adanya koordinasi antara dinas kesehatan setempat dan instansi lain yang berperan dalam pencegahan <i>stunting</i> . Dengan demikian lokus penelitian tersebut adalah dinas kesehatan dan instansi di Kota Padang yang relevan dengan kebijakan pencegahan <i>stunting</i> . Permasalahan dianalisis menggunakan konsep-konsep koordinasi. Setelah diteliti, ditemukan faktor penghambat yaitu belum adanya regulasi yang memuat kejelasan fungsi pokok dan tugas masing-masing instansi serta belum adanya anggaran khusus untuk program pencegahan <i>stunting</i> .	Perbedaan penelitian terletak pada lokus penelitian. Penelitian tersebut lokusnya adalah dinas kesehatan dan instansi terkait di Kota Padang, sedangkan penelitian ini berlokus pada Kabupaten Pringsewu khususnya OPD anggota tim percepatan penurunan <i>stunting</i> Kabupaten Pringsewu.
--	--	--

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dari yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Konteks penelitian yang dilakukan yaitu mengenai analisis koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Lokus penelitian ini terletak di Kabupaten Pringsewu khususnya tim percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Pringsewu. Indikator yang digunakan dalam menganalisis kinerja menggunakan ciri-ciri koordinasi menurut Handyaningrat (1991) yang mencakup :

1. Peran pimpinan dalam koordinasi dan kesatuan tindakan
2. Kerjasama dan proses terus menerus
3. Pengaturan usaha kelompok dan mencapai tujuan bersama

2.2 Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu kegiatan untuk mencapai sasaran dan kegiatan dari unit kerja yang terpisah dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif (Febrian & Yusran, 2021). Definisi tersebut sejalan dengan pendapat dari Irmadi (1991) yang menjelaskan bahwa koordinasi sebagai upaya yang dilakukan untuk menyatukan proses pada beberapa satuan unit kegiatan pada organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Koordinasi dapat diartikan sebagai usaha untuk memadukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja (unit-unit) organisasi sehingga organisasi berjalan sebagai kesatuan guna melaksanakan tugas organisasi untuk mencapai tujuan (Teguh, 2020). Menurut Ricky W. Griffin (1987) dalam Moekijat (1994) koordinasi adalah suatu proses menghubungkan kegiatan-kegiatan dari bermacam-macam bagian organisasi.

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan tindakan yang harmonis dalam mencapai sasaran (Sugihartatmo & Sentika, 2017). Menurut Stoner dan Wenkel (1989) koordinasi adalah proses menyatukan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari bagian-bagian suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efisien. Definisi tersebut searah dengan pendapat dari Henry L.Tosi dan Stephen J. Carrol (1982) dalam Moekijat (1994) yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan pengembangan dan pemeliharaan hubungan-hubungan secara terpadu diantara kegiatan-kegiatan dalam suatu koordinasi.

Menurut Hasibuan (2006) dalam Asmu, dkk (2018) koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengoordinasikan pekerjaan-pekerjaan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi merupakan pencapaian keselarasan dari usaha individu dan kelompok kearah pencapaian maksud dan tujuan kelompok (Konntz et al., 1984). Sementara James A.F Stoner (1986) dalam Moekijat (1994) koordinasi dapat dipahami sebagai pengaturan usaha kelompok secara rapi untuk memberikan kesatuan tindakan

guna mencapai tujuan bersama. Definisi-definisi diatas berkaitan erat dengan pengertian koordinasi menurut Alex S. Nitisemito (1985) dalam Moekijat (1994) yaitu tindakan seorang koordinator untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas/pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang/bagian yang satu dengan seseorang/bagian yang lainnya.

Koordinasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak sederajat untuk saling memberi informasi dan menyepakati hal tertentu (Asmu et al., 2018). Menurut Ndraha (2003) dalam Febrian dan yusran (2021) koordinasi merupakan suatu upaya untuk mencapai proses kesepakatan secara bersama dan mengikat pada kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sehingga menjadi kesatuan kegiatan yang terarah untuk mencapai target keberhasilan organisasi.

Menurut Ndraha (2003) dalam Mulawangsa, dkk (2021) koordinasi dapat diartikan dari segi normatif dan segi fungsional. Koordinasi dari segi normatif diartikan sebagai suatu kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang berbeda agar terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan dari segi fungsional koordinasi dilakukan untuk meminimalisir spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Koordinasi merupakan usaha kerjasama antar badan, instansi, unit, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, membantu, dan melengkapi (Asmu et al., 2018). Koordinasi adalah proses pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama (Sugihartatmo & Sentika, 2017). Koordinasi dalam organisasi publik atau instansi pemerintah pada intinya adalah untuk menyatukan segala upaya dan tindakan harmonis untuk mencapai tujuan bersama (Ramdhany & Djumiarti, 2016).

Menurut George Terry (1964) dalam Mulawangsa (2021) menegaskan bahwa koordinasi hanya akan terjadi apabila ada kesadaran antar pemimpin-pemimpin organisasi untuk bekerjasama dalam proses pelaksanaan kerja

dibawah pengarahannya individu yang memiliki kewenangan fungsional tertentu. Koordinasi menuntut sikap dan perilaku dari orang-orang, kepala-kepala unit, ataupun kepala-kepala instansi tertentu yang terlibat dalam hubungan kerjasama. Sikap yang dimaksud adalah sikap yang mengarahkan (koordinator) maupun sikap yang diarahkan atau yang dikoordinasikan (Mulawangsa & Nawir, 2021).

Koordinasi hanya dapat dicapai melalui hubungan kerja yang efektif dan terbentuk melalui komunikasi administratif untuk membantu tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil dan berdaya guna (Teguh, 2020). Komunikasi dan koordinasi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam administrasi (Mulawangsa & Nawir, 2021). Koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi (Asmu et al., 2018).

Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien (Mulawangsa & Nawir, 2021). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan upaya untuk menyatukan unit-unit yang berbeda dalam organisasi untuk menghasilkan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi.

2.2.1 Ciri-Ciri Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1991) ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan.

Koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Pimpinan dinilai berhasil jika telah melakukan koordinasi dengan baik.

- b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama.

Kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.

- c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*). Koordinasi merupakan proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan koordinasi

- d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur.

Koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

- e. Konsep kesatuan tindakan

Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama.

- f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*)

Kesatuan usaha atau tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Peneliti memilih untuk menggunakan ciri-ciri koordinasi dari Handayani (1991) karena lebih relevan dengan latar belakang masalah dalam penelitian. Ciri-ciri koordinasi tersebut akan digunakan untuk menganalisis koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu.

2.2.2 Prinsip dan Unsur Koordinasi

Menurut Sugihartomo dan Sentika (2017) unsur-unsur koordinasi terdiri dari:

1. Kesatuan Tindakan

Koordinasi harus dilaksanakan dengan kesadaran antar satuan organisasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Kesatuan tindakan merupakan inti koordinasi. Kesatuan tindakan berarti koordinator yang harus mengatur usaha-usaha tiap kegiatan individu agar serasi dalam mencapai hasil.

2. Komunikasi

Pendekatan utama dalam koordinasi adalah komunikasi. Komunikasi merupakan sarana memadukan aktifitas-aktifitas yang terorganisasi. Kerjasama dan saling melengkapi hanya dapat dilakukan dengan komunikasi. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif sehingga koordinasi tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi.

3. Integrasi

Integrasi merupakan usaha untuk menyatukan tindakan badan, instansi, dan unit sehingga pemikiran dan tindakan terarah pada suatu tujuan yang disepakati bersama. Salah satu kegiatan integrasi yaitu adanya standar operasional prosedur.

4. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah usaha untuk menyelaraskan kegiatan dan tindakan pada setiap unit sehingga ada keserasian dalam menjalankan tugas. Pelaksanaan sinkronisasi dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas sehingga meminimalisir tumpang tindihnya tugas.

5. Simplifikasi

Simplifikasi merupakan cara untuk lebih mudah dalam menjalankan tugas dengan cara membuat program-program yang realistis, sederhana, dan dapat dikerjakan.

6. *Continuity*

Koordinasi adalah proses yang berkesinambungan mulai dari yang dilakukan dalam setiap proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

7. *Direct Contact*

Adanya kontak langsung membuat proses koordinasi antar unit organisasi dapat berjalan baik karena ada komunikasi langsung. Kontak langsung berguna untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan antar anggota.

8. *Reciprocal Relation*

Prinsip timbal balik menjelaskan bahwa semua unsur dalam organisasi saling bergantung dan berhubungan. Setiap tindakan individu akan mempengaruhi keseluruhan organisasi. Dengan demikian setiap tindakan dan pengambilan keputusan harus dipikirkan secara matang.

9. *Mutual Respect*

Koordinasi dapat dilaksanakan apabila ada rasa saling menghargai sehingga hubungan antara atasan dan bawahan berjalan baik untuk memperlancar proses koordinasi.

10. *Clarity of Objective*

Koordinasi dapat diterapkan jika seluruh anggota organisasi memahami tujuan yang ingin dicapai organisasi. pemahaman yang baik menjadikan anggota organisasi menyadari pentingnya koordinasi.

11. *Scalar Chain*

Koordinasi dapat berjalan apabila garis kewenangan tersusun dari tingkat atas sampai rendah dalam struktur organisasi.

12. Mekanisme

Mekanisme koordinasi merupakan usaha saling menyesuaikan standarisasi prosedur kerja serta pembentukan tim atau badan koordinasi suatu kegiatan.

13. Pembagian Kerja

Pondasi dalam suatu organisasi adalah pembagian peran atau tugas. Pembagian tugas merupakan perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu atau unit bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.

14. Manajemen Internal

Manajemen internal mencakup perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan tugas.

15. Disiplin

Disiplin pada organisasi diperlukan agar usaha penyesuaian bagian yang berbeda dapat berjalan lancar. Disiplin waktu, administrasi, dan kepatuhan terhadap prosedur diperlukan dalam proses koordinasi.

16. Komitmen

Komitmen adalah keinginan kuat anggota untuk menjadi anggota organisasi tertentu, kesediaan untuk berusaha meningkatkan kemampuan diri, dan keyakinan untuk menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi.

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Koordinasi

Menurut Moekijat (1994) koordinasi merupakan usaha menyatukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Para pimpinan berpendapat bahwa koordinasi merupakan cara yang paling tepat untuk menentukan keseluruhan hasil kerja. Para pimpinan disebut koordinator. Koordinasi memungkinkan hasil kerja lebih besar daripada hasil kerja individu.

Menurut Sugihartomo dan Sentika (2017) Koordinasi sangat dibutuhkan sehingga organisasi tidak dapat menghindarinya karena setiap organisasi pasti memiliki unit-unit ataupun satuan-satuan organisasi yang mempunyai fungsi berbeda-beda tetapi memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saling ketergantungan yang menyatu
Saling ketergantungan yang menyatu dapat diartikan satuan-satuan organisasi tergantung kepada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan
Satuan organisasi harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu sebelum satuan yang lain bekerja.
3. Saling ketergantungan timbal balik
Saling ketergantungan ini diartikan sebagai hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

Adanya saling ketergantungan tersebut membuat koordinasi sangat diperlukan dalam mengintegrasikan kinerja setiap satuan atau unit. Koordinasi berperan sebagai fasilitator antar bagian yang saling bergantung.

Menurut Sugihartomo dan Sentika (2017) tujuan koordinasi meliputi:

- a. Menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dalam mencapai tujuan atau sasaran.
- b. Mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah sasaran organisasi.
- c. Menghindari kekosongan dan tumpah tindihnya suatu pekerjaan.
- d. Menghindari keterampilan *overlanding* dari sasaran organisasi.
- e. Mengarahkan keterampilan spesialis kearah tujuan organisasi.
- f. Mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen kearah tujuan organisasi.

Adapun manfaat koordinasi menurut Handoko (2003) dalam Asmu, dkk (2018) sebagai berikut:

- a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
- b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.

- c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
- d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
- e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

2.2.4 Jenis Koordinasi

Menurut Tosi dan Carrol (1982) dalam Asmu, dkk (2018) ada dua jenis koordinasi yaitu sebagai berikut:

- a. Koordinasi vertikal

Koordinasi ini menunjukkan adanya pengembangan hubungan-hubungan yang efektif dan disatupadukan diantara kegiatan-kegiatan pada tingkat-tingkat organisasi yang berlainan.

- b. Koordinasi horizontal

Koordinasi yang menunjukkan adanya pengembangan hubungan-hubungan yang lancar antar individu-individu atau kelompok-kelompok pada tingkat yang sama.

Berikutnya adalah jenis-jenis koordinasi menurut Dann Sugandha (1991) dalam Moekijat (1994) yaitu:

- a. Koordinasi Intern, koordinasi antar pejabat atau antar unit didalam suatu organisasi
- b. Koordinasi Ekstern, koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi
- c. Koordinasi Horizontal, koordinasi antar pejabat atau antar unit yang memiliki tingkat hirarki yang sama dalam suatu organisasi. koordinasi antar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat
- d. Koordinasi Vertikal, koordinasi antar pejabat/unit tingkat bawah dengan pejabat/unit atasannya

- e. Koordinasi Diagonal, koordinasi antar pejabat/unit yang berbeda fungsi atau berbeda tingkat hierarkinya
- f. Koordinasi Fungsional, koordinasi antar pejabat/unit/organisasi yang berdasarkan kesamaan fungsi.

2.2.5 Indikator-Indikator Koordinasi

Menurut Hasibuan (2006) dalam Iqbal (2020) menjelaskan indikator-indikator koordinasi sebagai berikut:

a. Kerjasama

Kerjasama merupakan interaksi antara dua pihak atau lebih secara dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

b. Kesatuan tindakan

Kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi. Koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dalam menjalankan tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemimpin harus mengatur agar usaha dari tiap individu serasi dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan merupakan kewajiban pimpinan untuk menciptakan koordinasi yang baik.

c. Komunikasi

Komunikasi dan koordinasi saling berkaitan karena unit-unit dalam organisasi hanya dapat dikoordinasikan dengan adanya komunikasi. Adanya komunikasi membuat partisipasi anggota semakin tinggi. Melalui komunikasi pimpinan memberikan informasi mengenai tugas kepada bawahan.

d. Pembagian kerja

Dalam organisasi prinsip dasarnya adalah pembagian kerja untuk mewujudkan tujuan organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli fungsi pekerjaan tertentu.

2.2.6 Masalah Koordinasi

Menurut Tosi dan Carrol (1982) dalam Moekijat (1994) masalah-masalah dalam koordinasi terjadi karena kondisi organisasi dan masalah SDMnya

1. Kondisi organisasi dan koordinasi

Situasi organisasi yang menyebabkan timbulnya masalah koordinasi adalah apabila kegiatan-kegiatan yang saling bergantung mempunyai jadwal waktu yang berlainan. Kegiatan dalam organisasi membutuhkan jumlah waktu berlainan untuk penyelesaiannya. Beberapa kegiatan dapat diselesaikan dengan cepat sedangkan ada kegiatan lainnya yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih lama. Perbedaan tersebut menyebabkan masalah koordinasi. Selain itu, apabila jarak geografis diantara bagian-bagian jauh. Apabila jarak orang-orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan terlalu jauh untuk memungkinkan adanya sering hubungan tatap muka, maka timbulah masalah koordinasi.

2. Faktor manusia dan koordinasi

Masalah koordinasi terjadi karena perbedaan diantara individu-individu/unit-unit dalam organisasi. Tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh beberapa unit/bagian akan terhambat jika tidak ada kesatuan tindakan untuk mencapai tujuan. Keterbatasan SDM, anggaran, dan

modal fisik membuat antar individu/bagian/unit bersaing untuk mendapatkannya dan menimbulkan permusuhan.

Disamping itu sumber pertentangan biasanya disebabkan oleh perbedaan antar anggota kelompok dalam menilai suatu ide atau solusi. Ada kelompok yang merasa idenya lebih tinggi daripada ide kelompok lainnya. Keadaan tersebut disebabkan karena anggota-anggota organisasi mempunyai pengalaman, pendidikan, dan pelatihan yang berbeda sehingga melihat suatu masalah, sebab, dan solusinya secara berlainan pula.

2.3 Koordinasi Dalam Organisasi

Suatu organisasi termasuk organisasi pemerintah digerakan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Tsauri, 2014). Menurut Armosudiro (2006) organisasi merupakan struktur pembagian kerja dan tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara menurut Money (1996) organisasi dapat didefinisikan sebagai persekutuan dua orang atau lebih yang bekerjasama secara formal dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Suatu organisasi dapat dibentuk apabila dipengaruhi oleh penyatuan visi, misi, dan tujuan dari sekelompok orang (Tsauri, 2014).

Kinerja organisasi berkaitan dengan keberhasilan pegawai, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan dengan perilaku yang diharapkan (Hartati et al., 2022). Suatu organisasi akan melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif jika ada tim yang bekerjasama secara giat (Lasmi et al., 2022). Koordinasi merupakan cara mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan pekerjaan yang relevan kepada masing-masing anggota tim dan menjaga agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan selaras dan semestinya (Sugihartatmo & Sentika, 2017). Organisasi dalam melaksanakan tugasnya akan lebih baik jika membentuk kelompok

kerja atau tim kerja (Bernhard et al., 2017). Dalam pembahasan ini perlu dipahami mengenai konsep tim.

Tim adalah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang mempunyai peran masing-masing serta saling berhubungan satu sama lain dan memiliki seperangkat nilai-nilai atau norma-norma mereka sendiri (Lasmi et al., 2022). Menurut Ingram (1999) dalam Lasmi, dkk (2022) tim kerja merupakan sekumpulan orang yang saling berinteraksi satu sama lain secara intensif dan menghasilkan suatu rencana atau keputusan. Sementara itu pendapat dari Mackall (2004) dalam Lasmi, dkk (2022) menyatakan bahwa tim kerja sebagai suatu proses dimana sekelompok orang menyatukan kemampuan dan keterampilan mereka untuk mencapai tujuan bersama.

Tim adalah kelompok kerja yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bertanggungjawab untuk pencapaian suatu tujuan (Bernhard et al., 2017). Menurut Tracy (2006) dalam Silviani (2017) tim dapat diartikan sebagai kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi. Tim merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih kemudian saling berinteraksi dan berkoordinasi tentang pekerjaan dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan tertentu (Silviani, 2017). Hal tersebut didukung oleh pendapat dari Dewi (2007) dalam Silviani (2017) yang menyatakan bahwa tim adalah bentuk kerja sama kelompok yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan sebuah tugas.

Kelebihan tim kerja adalah upaya-upaya individu-individunya menghasilkan kinerja yang lebih besar dibanding perorangan (Lasmi et al., 2022). Menurut Stephen dan Timothy (2008) dalam Silviani (2017) tim akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang diselesaikan sendiri. Tim kerja akan menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi (Bernhard et al., 2017). Dapat disimpulkan bahwa tim merupakan interaksi antara dua orang atau lebih yang berkoordinasi mengenai sebuah pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3.1 Faktor Pendukung Keberhasilan Koordinasi Melalui Tim Kerja

Menurut Donnellon (1996) dalam Lasmi, dkk (2022) faktor yang harus diperhatikan dalam penyebutan sebuah tim yaitu:

- a) *Identification*, sebagai anggota tim harus dapat mengidentifikasi diri sebagai sebuah tim yang sedang dijalani saat ini bukan tim lainnya sehingga dapat menyebut diri sebagai anggota kelompok.
- b) *Interdependence*, sebagai anggota tim pasti membutuhkan bantuan dan pendapat serta saran dari anggota tim yang lain.
- c) *Power Differentiation*, setiap anggota harus mengurangi power dengan memperlakukan secara imbang setiap anggotanya. Saling menghargai satu sama lain untuk menghindari perselisihan.
- d) *Social Distance*, sesama anggota tim harus mengurangi jaga jarak agar mempererat hubungan sosial sehingga antar masing-masing anggota menjadi lebih empati, saling menghargai dan mengapresiasi, serta memiliki pemikiran yang sama.
- e) *Conflict Management Tactics*, para anggota tim harus menyelesaikan konflik dengan cara berunding agar memahami pemikiran satu sama lainnya kemudian membuat upaya untuk berkompromi untuk menyelesaikan masalah secara baik.
- f) *Negotiation*, Proses Menggunakan *win-win solution* sehingga hasilnya dapat menguntungkan semua pihak yang ada.

2.4 Stunting

Kecukupan gizi dan pangan merupakan faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Saat ini permasalahan gizi yang sedang dihadapi oleh Indonesia khususnya Kabupaten Pringsewu adalah *stunting*.

Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan dengan tinggi badan orang lain pada umumnya (Rahayu et al., 2018). Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, *stunting* merupakan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi *kronis* dan infeksi berulang, hal tersebut ditandai dengan tinggi badan anak dibawah standar yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan. Adanya kasus *stunting* menunjukkan bahwa anak mengalami gizi kurang (*malnutrisi*) dalam jangka waktu yang lama (*kronis*) (Candra MKes(Epid), 2020).

Stunting merupakan kondisi kurang gizi akut yang berlangsung selama periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Periode 1000 HPK terhitung sejak dalam kandungan sampai dengan bayi berusia 24 setelah dilahirkan (Maulana et al., 2022). *Stunting* adalah kondisi BALITA yang terlahir dan hidup dengan berat badan rendah (Febrian & Yusran, 2021).

Menurut Rahayu dkk (2018) ciri-ciri anak *stunting* adalah sebagai berikut:

- a) Ditandai dengan pubertas yang terlambat
- b) Saat usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam atau pasif dan tidak banyak melakukan *eye contact*
- c) Pertumbuhan terhambat
- d) Wajah tampak lebih muda dari usianya
- e) Pertumbuhan gigi yang terlambat
- f) Pada saat tes perhatian dan memori belajar menunjukkan performa buruk

Dapat disimpulkan *stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama yang ditandai dengan tinggi dan berat badan yang rendah dibandingkan dengan anak seusianya.

2.4.1 Penyebab *Stunting*

Kejadian *stunting* disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor tersebut berupa faktor langsung dan faktor tidak langsung. Penyebab langsung seperti kurangnya asupan makanan bergizi dan penyakit infeksi. Penyebab tidak langsung seperti pola asuh ibu yang kurang tepat, kerawanan pangan, dan pelayanan kesehatan lingkungan yang kurang memadai (Grenluisa & Herbawani, 2022). Penyebab *stunting* menurut Candra (2020) adalah sebagai berikut:

a. Faktor *Genetik*

Banyak penelitian menghasilkan temuan bahwa tinggi badan orang tua sangat mempengaruhi terjadinya *stunting* pada anak. Faktor *genetic* tidak dapat diubah. Sifat pendek dan yang diwariskan pada keturunan menyebabkan *stunting* pada anak sulit diatasi.

b. Status Ekonomi

Status ekonomi yang kurang menyebabkan kemampuan untuk membeli bahan makanan menjadi rendah. Kualitas dan kuantitas pangan yang buruk menyebabkan kebutuhan gizi tidak terpenuhi sehingga menghambat tumbuh kembang anak.

c. Jarak Kelahiran

Jarak kelahiran dekat atau kurang dari 2 tahun merupakan resiko *stunting* pada anak. Jarak kelahiran berpengaruh pada pola asuh orang tua terhadap anak. Jarak kelahiran dekat membuat pola asuh cenderung kurang optimal dan membuat kebutuhan ASI salah satu anak tidak tercukupi.

d. Anemia pada ibu

Anemia pada ibu hamil disebabkan oleh kurangnya zat besi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin sehingga janin yang dilahirkan berpotensi *malnutrisi*.

e. Sanitasi Lingkungan

Faktor kebersihan dan kesehatan lingkungan juga mempengaruhi terjadinya *stunting*. Faktor tersebut yaitu Makanan yang tidak *higienis*,

kurangnya sanitasi yang memadai, bahan bakar memasak berkualitas rendah, dan pembuangan limbah lokal yang tidak memadai.

Selanjutnya adalah penyebab *stunting* menurut Kementerian PPN (2018) adalah sebagai berikut:

1. Faktor ketahanan pangan.

Ketersediaan dan keterjangkauan akses pangan bergizi yang minim.

2. Faktor lingkungan sosial.

Praktik pemberian makan pada bayi dan pola asuh yang kurang tepat.

3. Faktor Lingkungan kesehatan.

Akses pelayanan kesehatan yang kurang memadai untuk pencegahan dan pengobatan *stunting*.

4. Faktor lingkungan pemukiman.

Sarana air bersih dan sanitasi lingkungan yang tidak layak.

2.4.2 Dampak *Stunting*

Dampak *stunting* merupakan akibat yang akan dialami oleh penderita *stunting*. Dampak penderita *stunting* umumnya dikelompokkan menjadi dampak jangka pendek, dampak jangka menengah, dan dampak jangka Panjang. Dampak jangka pendek berupa menurunnya daya tahan tubuh. Dampak jangka menengah adalah terganggunya kemampuan intelektual dan kognitif anak penderita *stunting*. Dampak jangka panjangnya berupa rentan mengidap penyakit tidak menular saat usia dewasa seperti penyakit jantung, dan sebagainya (Grenluisa & Herbawani, 2022).

Menurut Rahayu, dkk (2018) dampak *stunting* terbagi menjadi dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak Jangka Pendek

Stunting mengganggu perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh.

2. Dampak Jangka Panjang

Stunting dapat menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunkan kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan memiliki resiko tinggi bagi munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua.

Anak penderita *stunting* biasanya akan tumbuh dewasa dengan kurang berpendidikan karena terhambat oleh rendahnya kemampuan intelektual. Hal tersebut akan menciptakan sumberdaya manusia yang kurang berkualitas sehingga kualitas hidupnya akan rendah. Kualitas hidup rendah menyebabkan pendapatan berkurang dan akhirnya tidak mampu menjangkau makanan bergizi sehingga rantai perkembangan kasus *stunting* sulit untuk dikendalikan (Grenluisa & Herbawani, 2022).

2.5 Kerangka Pikir

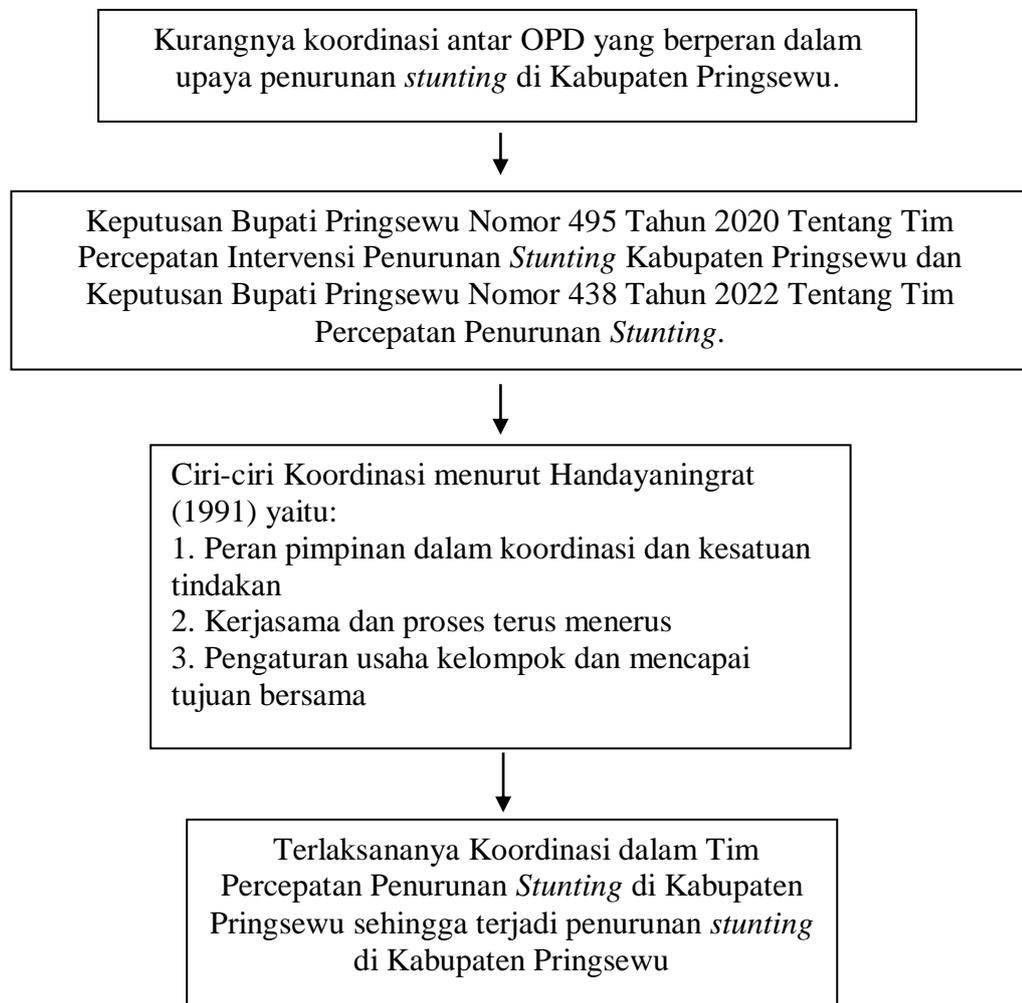
Upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu memerlukan kerjasama dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan dalam upaya penurunan *stunting*. Pelaksanaan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu mengalami kendala yaitu OPD-OPD yang berperan kurang mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi dalam upaya menurunkan *stunting*.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah dengan membentuk tim percepatan intervensi penurunan *stunting* Kabupaten Pringsewu melalui Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 495 Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 438 Tahun 2022. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas untuk

mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.

Koordinasi antar anggota tim perlu dianalisis. Peneliti memilih ciri-ciri koordinasi menurut Handyaningrat (1991) yang mencakup peran pimpinan dan kesatuan tindakan, kerjasama dan proses terus menerus, serta pengaturan usaha kelompok dan mencapai tujuan bersama untuk menganalisis.

Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut John Cresswell (2008) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk memahami suatu gejala sentral. Gejala sentral tersebut diperoleh dari hasil wawancara berupa teks untuk dianalisis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang mengamati fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia (Ahyar et al., 2020).

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Harahap, 2020). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena mendeskripsikan fenomena yang ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan fenomena bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya (Abdussamad, 2021). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk menganalisis gejala-gejala, fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat populasi atau daerah tertentu (Ahyar et al., 2020).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif tersebut untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Koordinasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pringsewu.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti harus menetapkan fokus. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus didasarkan pada kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial dan penelitian (Ahyar et al., 2020). Fokus penelitian bermanfaat untuk mengarahkan peneliti agar lebih fokus terhadap masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis koordinasi TPPS di Kabupaten Pringsewu. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan koordinasi menggunakan ciri-ciri koordinasi menurut Handyaningrat (1991) yang kemudian peneliti ringkas menjadi 3 ciri-ciri karena terdapat persamaan konsep. Berikut ini adalah 3 ciri-ciri tersebut:

1. Peran pimpinan dalam koordinasi dan kesatuan tindakan

Peran pimpinan berfokus pada wewenang dan tanggungjawab pimpinan TPPS Kabupaten Pringsewu agar koordinasi dalam tim berjalan dengan baik. Peran pimpinan dalam koordinasi juga membahas mengenai koordinator TPPS sebagai fasilitator. Kesatuan tindakan berfokus pada cara pimpinan tim untuk mengatur usaha/tindakan anggota tim agar ada keserasian dalam menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Pringsewu.

2. Kerjasama dan proses terus menerus

Kerjasama berfokus pada kerjasama yang telah dilakukan TPPS Kabupaten Pringsewu dalam berkoordinasi. Proses terus menerus berfokus pada upaya tim untuk berkoordinasi secara berkesinambungan untuk menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Pringsewu.

3. Pengaturan usaha kelompok dan mencapai tujuan bersama

Pengaturan usaha kelompok dan mencapai tujuan bersama berfokus pada kesadaran dan sikap saling pengertian anggota TPPS Kabupaten Pringsewu dalam mencapai tujuan bersama yaitu menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Pringsewu.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat bagi seorang peneliti untuk memperoleh informasi berupa data untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian berkaitan dengan identifikasi karakteristik lokasi, alasan memilih lokasi, serta cara peneliti masuk kedalam lokasi (Ahyar et al., 2020). Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu masuk kedalam perluasan Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi tahun 2021 menurut Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu penyumbang angka *stunting* yang cukup tinggi di Provinsi Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Siyoto (2015) data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berbentuk angka, gambar, dan kata-kata (Ahyar et al., 2020). Jenis data menurut Ahyar, dkk (2020) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari sumber pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data diperoleh dari sumber pertama yaitu Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pringsewu dan didukung oleh Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas P3AP2KB, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasil data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara dengan informan.

Kegiatan observasi dilaksanakan dengan mengamati dan ikut serta dalam kegiatan *moniroting* dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dalam tim percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu. Kegiatan wawancara dilaksanakan dengan mewawancarai sebagian anggota tim percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Pringsewu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan dari berbagai sumber yang sudah tersedia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku, berita dari media online, Surat Keputusan (SK), dan laporan yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan jurnal dan buku yang relevan dengan kajian penelitian mengenai koordinasi OPD dalam upaya penurunan *stunting*. Berikutnya adalah regulasi dari pusat dan daerah tentang penurunan *stunting*, Surat Keputusan, Rancangan Aksi Daerah Penangan *stunting*, Laporan Akhir pelaksanaan penurunan *stunting* Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 dan 2021 (Baca Tabel Halaman 35).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti dalam mendapatkan data dalam penelitian (Ahyar et al., 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data menurut Ahyar,dkk (2020) yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang sistematis mengenai gejala-gejala yang sedang diamati. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti ikut serta dalam kegiatan yang sedang

diamati. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan berpartisipasi dalam kegiatan rapat koordinasi yang diadakan oleh Bappeda Kabupaten Pringsewu mengenai koordinasi OPD-OPD yang terlibat dalam upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu. Selama observasi berlangsung peneliti memperoleh informasi mengenai bagaimana koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* yang ditinjau dari peran pimpinan dalam koordinasi dan kesatuan tindakan, kerjasama dan proses terus menerus, pengaturan usaha kelompok dan mencapai tujuan bersama dalam upaya menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Pringsewu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung dengan tujuan dan maksud tertentu. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara penanya dan responden menggunakan panduan wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada sebgaiang anggota tim percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Pringsewu untuk mengumpulkan informasi terkait dengan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian. Informan yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Tempat Tugas	Tanggal Wawancara
1.	Christianto H. Sani, S.H, M.H	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kab.Pringsewu	BAPPEDA Kabupaten Pringsewu	03 Maret 2023

2.	Sumarno, S. Pd, M.M	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pringsewu	Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu	10 Maret 2023
3.	Ria Handayani	Penata Kependudukan dan Kelurga Berencana Dinas P3AP2KB Kab. Pringsewu	Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu	13 Maret 2023
4.	Yuli Efrizal, S.IP	- Kepala Seksi Teknik Penyiaran Diskominfo Kab. Pringsewu - Direktur Radio Pemerintah Daerah Kab.Pringsewu	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu	14 Maret 2023
5.	Drs. Firdaus Tarunajaya, M.M	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pringsewu	Dinas Ketahanan Kabupaten Pringsewu	15 Maret 2023
6.	Tri Nova Nurhayati, S.Km, M.M	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Pringsewu	Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu	16 Maret 2023
7.	Dedy Akhmadi, S.Pt, M.IP	Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kab.Pringsewu	Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu	16 Maret 2023
8.	Aminah S.E	Pengawas Perikanan Ahli Muda Dinas Perikanan Kab. Pringsewu	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu	20 Maret 2023
9.	Yuli Saptikawati, S. Pd, M.M	Camat Kecamatan Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	26 Juli 2023

10.	Arvita Hapsari	Staff Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pagelaran	Kecamatan Pagelaran	28 Juli 2023
11.	Amel	Kader Pembangunan Manusia (KPM) Pekon Sukoharjo II	Pekon Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo	24 Juli 2023
12.	Diana	Kader Pembangunan Manusia (KPM) Pekon Pamenang	Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran	24 Juli 2023

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

3. Dokumentasi

Dokumentasi berarti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen. Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dalam penelitian ini dokumentasi yang didapat berupa arsip-arsip dokumen yang berkaitan dengan koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu.

Tabel 4. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian

No	Nama Dokumen
1.	Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
2.	Keputusan Menteri Pembangunan Nasional No. 42 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi Tahun 2021
3.	Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 495 Tahun 2020 Tentang Tim Percepatan Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Pringsewu
4.	Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Pringsewu

5.	Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 272 Tahun 2021 Tentang Pekon/Desa dan Keluarahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi Kabupaten Pringsewu Tahun 2022
6.	Laporan Akhir Rencana Aksi Daerah <i>Stunting</i> Kabupaten Pringsewu Tahun 2020
7.	Laporan Pelaksanaan Penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 dan 2021

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara memilah data, mengorganisasikan data, menyusun, dan membuat simpulan (Ahyar et al., 2020). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam Wanto (2018) yaitu sebagai berikut :

1. Kondensasi data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, memfokuskan, meyederhanakan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris. Proses kondensasi diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data dari tertulis di lokasi penelitian kemudian memilah dan mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu.

2. Penyajian Data

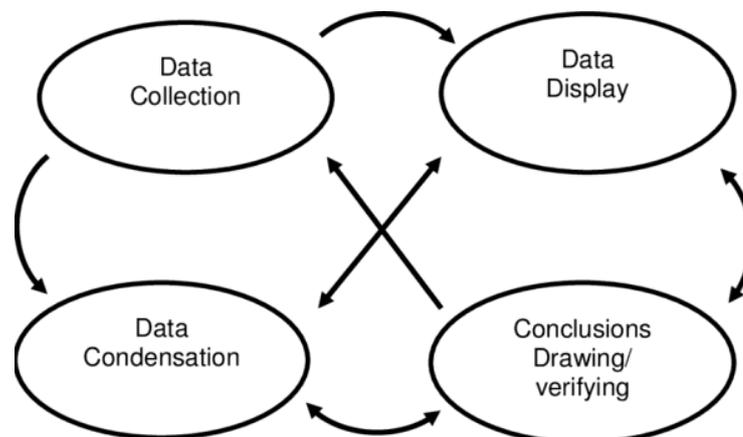
Penyajian data adalah proses pengorganisasian, penyatuan, dan kemudian disimpulkan. Penyajian data ini berguna untuk membantu memahami

konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk melihat sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan tim percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti. Disini peneliti berusaha memperjelas dengan menggunakan teori yang sudah teruji keberhasilannya, lalu peneliti menganalisis temuan baru tersebut sehingga menjadi jelas. Penarikan kesimpulan disesuaikan dengan tujuan penelitian dan fokus penelitian yaitu menganalisis koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu menggunakan indikator-indikator koordinasi menurut Handyaningrat (1991) yaitu peran pimpinan dalam koordinasi dan kesatuan tindakan, kerjasama dan proses terus menerus, pengaturan usaha kelompok dan mencapai tujuan bersama.

Gambar 2. Analisis data Model Interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014)



Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam Wanto (2018)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan dilakukan untuk mengukur apakah data dan proses pencariannya sudah benar. Penelitian kualitatif merupakan alat untuk menjawab masalah penelitian melalui kriteria-kriteria keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada keabsahan data menurut Ahyar, dkk (2020):

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas menekankan pada data dan informasi yang digunakan dalam penelitian harus mengandung nilai kebenaran sehingga dapat dipercaya oleh pembaca. Uji kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi dilakukan dengan mengecek teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan dengan mengecek sumber data penelitian yang berkaitan dengan koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu. Pengecekan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan hasil observasi serta dokumentasi.

2. Uji keteralihan

Uji keteralihan menunjukkan hasil penelitian dapat diaplikasikan kepada konteks lain melalui uraian yang rinci. Uraian rinci akan membantu pembaca memahami temuan dalam penelitian. Uji keteralihan dilakukan dengan melaporkan hasil penelitian secermat mungkin sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, hasil analisis mengenai koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu dilaporkan secara rinci dan jelas mengacu pada fokus penelitian tentang kriteria kinerja yang telah ditetapkan untuk memudahkan pembaca memahami temuan penelitian.

3. Uji Ketergantungan

Uji ketergantungan dilakukan untuk menilai apakah penelitian yang dilakukan bermutu atau tidak melalui *audit* terhadap keseluruhan proses penelitian. Pengujian dilakukan oleh *auditor* atau pembimbing terhadap seluruh aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan fokus penelitian, sumber data yang digunakan, analisis data, sampai pada pembuatan kesimpulan koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu. Setelah itu peneliti akan mendiskusikan hasil penelitian dengan pembimbing untuk mengetahui mutu penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai koordinasi tim percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Pringsewu peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi di tim tersebut sudah berjalan dengan baik. Ditinjau dari peran koordinator/pimpinan dalam mengadakan koordinasi menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yaitu merumuskan regulasi yang dijadikan pedoman dalam koordinasi tim. Koordinator sudah berupaya menyatukan tindakan dari proses sosialisasi sampai evaluasi. Koordinator membuka akses seluas-luasnya untuk koordinasi. Kerjasama antar anggota tim sudah berjalan dengan baik dengan saling membantu dan melengkapi. Proses perencanaan sampai evaluasi kegiatan penurunan *stunting* sudah bersifat berkelanjutan. Pengaturan usaha kelompok telah terwujud dalam berbagai kegiatan pendampingan. Kesadaran anggota tim untuk melaksanakan tugas penurunan *stunting* sudah tertanam untuk mencapai tujuan bersama.

Secara keseluruhan TPPS Kabupaten Pringsewu telah berkoordinasi untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Hambatan yang tidak terlalu berdampak signifikan bagi pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* adalah saat diadakan komunikasi antara TPPS Kabupaten Pringsewu dengan pekon lokus, kehadiran seluruh pekon lokus

penurunan stunting sudah mencapai 95% sedangkan ketidakhadiran hanya 5% saja. TPPS Kabupaten Pringsewu telah mengupayakan agar pekon tersebut hadir dengan konfirmasi ulang dan komunikasi melalui *whastapp grup*.

5.2 Saran

TPPS Kabupaten Pringsewu harus memperbaiki komunikasi dengan penanggungjawab TPPS di tingkat pekon lokus *stunting*. Koordinator dan anggota TPPS mempererat hubungan sosial sehingga antar masing-masing anggota menjadi lebih empati, saling menghargai dan mengapresiasi, serta memiliki pemikiran yang sama. Caranya adalah dengan melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik secara personal kepada perwakilan TPPS Pekon penurunan *stunting* Kabupaten Pringsewu sehingga timbul rasa saling peduli dan menghargai. Pihak TPPS Pekon yang tidak hadir harus konsisten dan lebih berkomitmen terhadap kesepakatan dan koordinasi dalam penurunan *stunting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV. Syakir Media Press.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Asmu, H., Haris, I., & Lamatenggo, N. (2018). Keefektifan koordinasi kepala sekolah dalam mengintegrasikan program dan kegiatan di SMA Negeri 1 Manangu Kabupaten Boalemo. *Jurnal Riset Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, 3(1), 87–94.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu. 2023. *Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2023*.
- Bappeda Kabupaten Pringsewu. (2020). *Laporan Stunting*.
- Bappeda Kabupaten Pringsewu. (2020). *STUNTING*.
- Bernhard Tewal, Adolfiana, Merinda, Pandowo, H. (2017). *Perilaku Organisasi*. Bandung : CV. Patra Media Grafindo.
- Candra MKes(Epid), D. A. (2020). *Pencegahan dan Penanggulangan Stunting*. In *Epidemiologi Stunting*. Semarang : Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- E. Silviani, B. T. (2017). PENGARUH KOMUNIKASI, MOTIVASI DAN KERJASAMA TIM TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 5(1), 47-57.
- Eni, N., & Asridiana, A. (2020). Prevalensi Pencabutan Gigi Permanen Di Poliklinik Gigi Puskesmas Kaluku Bodoa Di Kota Makassar. *Media Kesehatan Gigi : Politeknik Kesehatan Makassar*, 19(1), 12–19. <https://doi.org/10.32382/mkg.v19i1.1596>.
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 11–21. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214>.
- Grenluisa, T., & Herbawani, C. K. (2022). Upaya Penurunan Kejadian Stunting Pada Masa Pandemi di Indonesia : Studi Literatur. *Jurnal medika cendikia*. 09 (01), 1-13.
- Handayani, S. (1982). *ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL*. Jakarta : PT Gunung Agung.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan : Wal Ashri Publishing.
- Hartati, A., Fanggida, H. C., Binawati, E., Aisyah, S., Fanggida, F. O., Ala, H. M., Rosari, R., Lake, F. L., Sitinjak, C., & Lerrick, Y. F. (2022). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Teori Dan Aplikasi*. In *Media Sains Indonesia* (Issue July). Bandung : CV. Media Sains Indonesia.
- Iqbal, M. (2020). Koordinasi Kepolisian Dan Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Nunukan. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 370–784.

- Kurniasih, Y., Sri, S., & Septiana,, W, H . (2023) *Collaborative Governance Dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Temanggung. Journal of Public Administration and Local Governance*, 7(1), 68-76.
- Lasmi, A., Bayhaqi, H., Negeri, I., & Utara, S. (2022). Dawatuna : Journal of Communication and Islamic Broadcasting *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*. 2, 35–45.
<https://doi.org/10.47476/dawatuna.v2i1.509>
- Maulana, I. N. H., Sholihah, Q., & Wike. (2022). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 99–107.
- Moekijat. (1994). *KOORDINASI (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Mulawangsa, M., & Nawir, A. (2021). Efektivitas Fungsi Koordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Camat Di Kabupaten Sinjai dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015. *Journal Government Insight*, 1(2), 92–103.
<https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>.
- Natalia & Adyl. (2023). Leadership Traits as the Basis for Effective Intercation Between the Leader and the Team. *Journal of Leadership in Organizations*, 5(1), 36-64.
- Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). *Study Guide - Stunting dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta : CV. Mine.

- Ramdhany, I., & Djumiarti, T. (2016). Faktor-Faktor dalam Koordinasi Lintas Sektoral Pengelolaan Drainase di Kota Semarang. *Fisip Undip*, 1–16.
- Savira, A., Neneng, W. I & Nina, K. (2023). Koordinasi Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(2), 513-519.
- Setiawan, N., E & Arimurti., K. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149-155.
- Sugihartatmo, & Sentika, T. R. (2017). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial* (pp. 1–214). Jakarta : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.
- Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) Periode 2018-2024.
- Teguh, N. (2020). *KOORDINASI PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PERMATA KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA*. 1–20
- Wanto, A., H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *Journal of Public Sector Innovations*, 2(1), 39-43.
- Wicaksana, A. (2016). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Koordinasi Konvergensi Pencegahan *Stunting* Di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. 1-14.

Regulasi:

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 495 TAHUN 2020 TENTANG
TIM PERCEPATAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING.

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 592 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN PEKON/DESA DAN KELURAHAN LOKASI FOKUS
INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI
KABUPATEN PRINGSEWU.

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 272 TAHUN 2021 TENTANG
PEKON/DESA DAN KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI
PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI KABUPATEN
PRINGSEWU TAHUN 2022.

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 438 TAHUN 2022 TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERLUASAN
KABUPATEN/KOTA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021.